ANALISIS STRATEGI KEMENANGAN CALON INDEPENDEN MELAWAN PARTAI PENGUSUNG KOALISI 12 PARPOL DI SERUYAN KALIMANTAN TENGAH

Charissa Sherly Fitriana

Penulis Management Pemerintahan dan Politik Lokal Fisip Unair
(fitrianacharissa.fc@gmail.com)

Abstract

In the midst of many people getting upset against gait political parties existing political parties in Indonesia, the emergence of figures who ran candidates for regional head of independent paths actually give a glimmer of hope in itself. The non-political background makes people have big expectations for them. In 2013 there has been a case phenomenal in the election of the regent and deputy regent who successfully defeated a coalition of 12 political parties, Regent Seruyan Sudarsoo Sign Muri Records Victory phenomenal achieved by Regent Seruyan Sudarsono, SH, and Vice Regent Yulhaidir finally noted Musem Indonesian World Record (MURI) . This study aimed to determine the patterns of the pair winning strategy independent path H. Sudarsono, SH - Yulhaidir against H. Ahmad Ruswandi couples - H. Sutrisno, which carried a large coalition of 12 political parties, viewed from the perspective of the social, political, and economic development Seruyan District Central Kalimantan. The theoretical framework used is independent theory, coalition theory and strategy theory pemenagan. This study used a qualitative approach (qualitative research), which produces descriptive data, in the form of words, words, text, documents, and actions performed research informants. Sudarsono election in the 2009 elections can be said as the election results are quite phenomenal at the district level, especially in the district and East Kotawaringin Seruyan.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilaksanakan secara lansung di Indonesia merupakan konsekuensi dari tuntutan dan perluasan mekanisme demokrasi, agenda reformasi dan desentralisasi. pada ranah politik, letupan gerakan demokrasi pasca demokrasi, telah mampu membangkitkan kesadara

politik di daerah, untuk merespon dominasi politik sentralistik pada era sebelumnya. Reformasi, demokrasi dan desentralisasi telah menjadi kata kunci bagi prilaku politik.terutama pada para pelaku politik di atas lokal. Lokalitas politik dapat dihubungkan melalui reformasi kelembagaan kea rah desentralisasi. Desentralisasi lokal, partisipasi lokal dan mobilisasi politik dilokalisir politik ini pula terdpat penekanan terhadap desentralisasi penguasa politik(devolusi) ke pemerintah lokal, desentralisasi demokratik, yaitu penguatan peran dan hak politik masyarakat lokal[1].

Dari sisi normatif, penyelenggaran pilkada telah diatur UU no mor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, sebagai pengganti UU nomor 22 tahun 1999. Setelah "Amandemen" MK atas UU tersebut, pemerintah mengeluarkan perpu nomor 3 tahun 2005 sebagai perubahan atas UU nomer 32 tahun 2004. Seiring dengan itu pemerintah telah mengeluarkan PP no 17 tahun 2005 sebagai pengganti PP nomor 6 tahun 2005 tentang premilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Salah satu isu penting dalam undang-undang, perpu dan PP tersebut adalah berkaitan dengan pengaturan pemilihan kepala daerah secara langsung. Dengan pemilihan kepala daerah secara langsung, kepala daerah seperti gubernur, bupati/walikota akan dipilih oleh rakyat. Sesuai dengan pasal 56 ayat 1 UU no 32 tagun 2004menyebutkan "Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.[2] Ada kesempatan bagi calon independen untuk mencalonkan sebagai kepala daerah, namun ayat 2 pasal 56 menegaskan bahwa, pasangan calon sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diajukan partai politik atau gabungan partai politik, artinya UU no 32 tahun 2004 menutup peluang bagi calon independen (non partai) untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah.[3]

Jika diidentifikasi setidaknya ada beberarapa problem yang berkaitan dengan persiapan daerah dalam menyelenggarakan pilkada, diantaranya: beratnya sarat

---

[1] Wawan E. Kuswandoro, 2008, "*Anti Klimaks Politisasi Demokrasi Lokal*", Surabaya: Nuansa Print, Hlm 1

[2] Muhammad Asfar, 2006, *"Mendesain Managemen Pilkada",* Surabaya: Pustaka Eureka, Hlm 1

[3] *Ibid* Hlm 2

pengajuan calon, hanya partai politik yang memperoleh suara 15% kursi di DPRD atau 15% suara pileg yang berhak mengajukan calon. Pasal 59 ayat (2) menyebutkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana yang dimaksud boleh mendaftarkan calon apabila memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRD atau 15 dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.[4]

Berdasarkan pasal 61 UU nomor 32 tahun 2005 menyebutkan, " hasil penelitian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 60 ayat 2 ayat 4, KPUD menetapkan pasanngan pasangan calon paling kurang 2 pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara pasangan calon". Memang dalam PP disebutkan "dalam hal tidak terpenuhi 2 pasangan calon sebagaimana dimaksud ayat 1, KPUD mengembalikan kepada partai politik yang mencalonkan dan partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan mengajukan kembali pasangan calon sehingga sekurang-kurangnya 2 pasangan calon.[5] Oligarki juga menjadi momok masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. Oligarki dalam pengertian kekuasaan dan pengambilan keputusan berada di tangan segelintir elite partai, ternyata masih melembaga dalam kehidupan partai pasca-Orde Baru. Kecenderungan kekuasaan dan kepemimpinan yang oligarkis itu tampak jelas dalam proses pencalonan kepala daerah pada semua partai yang dteliti. Namun demikian oligarki kemudian memperoleh "warna lokal" ketika struktur masyarakat setempat ikut menentukan peluang seseorang menjadi kepala daerah. Semakin sentral posisi seseorang dalam strusktur dominasi masyarakat setempat maka makin besar pula peluangnya menempati posisi strategis dalam daftar calon kepala daerah.[6]

Di tengah semakin kecewanya masyarakat banyak terhadap kiprah parpol parpol yang ada di Indonesia, kemunculan figur-figur yang mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah dari jalur independen sesungguhnya memberikan secercah

---

[4] Muhammad Asfar, 2006, *"Mendesain Managemen Pilkada",* Surabaya: Pustaka Eureka, Hlm 96
[5] *Ibid*, Hlm 97
[6] Syamsuddin Haris, 2014, "Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai", Jakarta: PT Gramedia Pustaka, Hlm 24

harapan tersendiri. Latar belakangnya yang non parpol membuat masyarakat memiliki ekspektasi besar kepada mereka. Masyarakat berharap jika calon dari jalur independen terpilih, mereka bisa bekerja dengan baik dan sepenuhnya memihak kepada rakyat. Karena selama ini jika figur yang terpilih menjadi pemimpin adalah calon yang diusung parpol, ketika sudah menjalankan amanahnya pemimpin tersebut sedikit banyak akan selalu mementingkan kepentingan parpol yang telah mengantarkannya terpilih menjadi pemimpin. Tentu bukan suatu masalah jika kepentingan parpol tersebut tidak mengesampingkan kepentingan rakyat, tetapi pada kenyataannya kepentingan parpol justru seringkali mengesampingkan kepentingan rakyat, bahkan baru-baru ini survei yang diselenggarakan oleh Cirus Surveyeors Group mengungkapan angka ketidakpercayaan publik terhadap partai politik (parpol) bisa membawa aspirasi mereka mencapai 79,2%. Sementara hanya 9,4% yang menyatakan masih menaruh harapan kepada parpol dan sisianya 11,4% menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab. Landasan hukum pengusungan calon kepala daerah dari jalur independen tertuang dalam UU Nomor 12/2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU tersebut merupakan perubahan dari aturan sebelumnya untuk menyesuaikan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi.[7]

Seperti yang terjadi di Kabupaten Seruyan tentu dapat memunculkan banyak pertanyaan dan menantang refleksi politis, lebih-lebih bagi mereka yang berminat akademis tentu banyak pertanyaan menggugat yang harus ditambahkan pada tumpukan pekerjaan rumahnya. Di Kabupaten Seruyan, salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ibu kotanya Kuala Pembuang. Kabupaten dengan motto Gawi Hantatiring (Bekerja Bersama-sama) ini di sebelah utaranya berbatasan dengan Provinsi Kalimantan barat, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Timur, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Barat, sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan laut Jawa. Luas

[7]http://download.portalgaruda.org/article.php?article=164790&val=4924&title=PERANAN%20MODAL%20SOSIAL%20DALAM%20KEMENANGAN%20SATONO%20DARI%20JALUR%20INDEPENDEN%20PADA%20PEMILIHAN%20UMUM%20KEPALA%20DAERAH%20DI%20KABUPATEN%20LAMPUNG%20TIMUR%20TAHUN%202010

wilayah Kabupaten Seruyan 16.404 Km2.Pada tahun 1996 penduduk di Kecamatan Seruyan Hulu, Kecamatan Seruyan Tengah, Kecamatan Hanau, Kecamatan Danau Sembuluh, dan Kecamatan Seruyan Hilir berjumlah 76.084 jiwa dan pada tahun 1999 berjumlah 112.519 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata 4,6 % per tahun.[8]Pada tahun 2013 telah terjadi hal fenomenal dalam pemilihan bupati dan wakil bupati yang berhasil kalahkan koalisi 12 parpol, Bupati Seruyan Sudarsoo Masuk Rekor Muri Kemenangan fenomenal yang diraih Bupati Seruyan Sudarsono, S.H., dan Wakil Bupati Yulhaidir akhirnya dicatat di Musem Rekor Dunia Indonesia (MURI). Seperti diketahui, pasangan bupati dan wakil bupati di Provinsi Kalimantan Tengah itu memenangkan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) langsung 2013 dari jalur independen atau tanpa diusung partai politik. Tidak tanggung-tanggung, keduanya berhasil mengalahkan koalisi 12 partai politik (parpol). Deputi Manajer MURI Awan Rahargo menuturkan, salah satu alasan MURI mencatatkan nama keduanya kedalam rekor karena sudah memenuhi beberapa kriteria. Disampaikan Awan, nama Bupati Seruyan Sudarsono dan Wakil Bupati Yulhaidir itu dimasukkan ke dalam nomor urut rekor MURI 6.425. Pesan dari pencatatan rekor MURI ini supaya bias menggambarkan bahwa tidak ada yang mampu menghentikan kehendak rakyat. Ini dari jalur independen bias mengalahkan koalisi 12 partai politik. Sementara itu, Bupati Seruyan Sudarsono menuturkan, sebenarnya pada awalnya ia adalah politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengan 2009-2014. Tetapi pada saat mencalonkan diri jadi Bupati Seruyan, PKS tidak mendapatkan kursi sama sekali. Maka Sudarsono memutuskan maju menjadi calon bupati lewat jalur independen (perseorangan). Kemanangan fenomenal Sudarsono ini tampaknya senafas dengan ucapan terkenal Ulyases S. Grant, Presiden ke-18 AS, yakni: "Kehendak rakyat adalah hukum terbaik,".[9]

[8]https://id.linkedin.com/pulse/kajian-teoritis-permentan-98-tahun-2013-kemitraan-plasma-eko-zulkifli

[9] Harun Husein, 2014*,"Pemilu Indonesi"*, Jakarta Selatan: Perludem, Hlm 148-149

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pola strategi kemenangan pasangan calonindependen H. Sudarsono, S.H-Yulhaidir melawan pasangan H. Ahmad Ruswandi – H. Sutrisnoyang diusung koalisi besar 12 partai politik di Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pola-pola strategi kemenangan pasangan calon independen H. Sudarsono, S.H - Yulhaidir melawan pasangan H. Ahmad Ruswandi – H. Sutrisno yang diusung koalisi besar 12 partai politik, dilihat dari perspektif sosial, politik, dan perkembangan ekonomi Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 STRATEGI POLITIK

Kata strategi pada mulanya sangat akrab di kalangan militer, secara etimologis berasal dari kata majemuk bahasa Yunani, yaitu Strategos yang berarti pasukan dan agein yang berarti memimpin atau Strategi yang berarti kepemimpian atas pasukan, seni memimpin pasukan. (Schroder. 2009:1). Dalam Wikipedia Indonesia Pengetian Strategi adalah rencana jangka panjang dengan diikuti tindakan-tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu, yang umumnya adalah "kemenangan". Henry Mintzberg mendefinisikan strategi sebagai 5P, yaitu: strategi sebagai perspectif, strategi sebagai posisi, strategi sebagai perencanaan, strategi sebagai pola kegiatan, dan strategi sebagai “penipuan” (Ploy) yaitu muslihat rahasia. Sebagai Perspektif, dimana strategi dalam membentuk misi, misi menggambarkan perspektif kepada semua aktivitas. Sebagai Posisi, dimana dicari pilihan untuk bersaing. Sebagai perencanaan, dalam hal strategi menentukan tujuan performansi perusahaan. Sebagai Pola kegiatan, dimana dalam strategi dibentuk suatu pola, yaitu umpan balik dan penyesuaian.

Pengertian Strategi menurut Daoed Yoesoef (1981: 2) bahwa studi strategi dan studi hubungan internasional merupakan hal yang sangat berkaitan. Keduanya dapat

dibedakan secara substansial namun sulit untuk dipisahkan. Terwujudnya suatu strategi padaasasnya melalui empat tahapan :

a) Tahap perumusan yaitu, perbuatan intelektual

   Tahap pertama diartikan sebagai keseluruhan keputusan-keputusan kondisional yang menetapkan tindakan-tindakan yang harus dijalankan guna menghadapi setiap keadaan yang mungkin terjadi di masa depan.

b) Tahap pemutusan yaitu, perbuatan politis

   Tahap kedua yakni peralatan politik meliputi diplomasi, kebijakan (politik), pertahanan ekonomi, peralatan psikologi dan angkatan bersenjata. Peralatan ekonomi meliputi semua potensi ekonomi masyarakat.

c) Tahap pelaksanaan yaitu, perbuatan teknis

   Pada tahap ketiga, pengertian strategi mengalami evolusi dari pengertian sempit ke pengertian luas. Dalam pengertian sempit, strategi diartikan sebagai seni menggunakan kekuatan militer untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh politik. Secara luas strategi diartikan sebagai seni menggunakan berbagai kekuatan yang dimiliki untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh politik.

d) Tahap penilaian adalah perbuatan intelektual keputusan-keputusan strategi memiliki karakteristik berikut :

   1. Penting
   2. Tidak mudah diganti
   3. Melibatkan komitmen atas sumber daya dalam waktu tertentu

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah upaya menyusun perencanaan dengan langkah-langkah sistematis guna memenangkan suatu pertempuran secara politis. Terdapat unsur-unsur tambahan agar berbagai strategi yang telah disusun (direncanakan), berjalan maksimal yaitu, taktik. Taktik yang baik sangat diperlukan dalam memukul atau mengalahkan lawan, secara ideologi maupun politik.

1. Pengertian Strategi Politik

Strategi politik adalah strategi yang digunakan untuk meralisasikan cita-cita politik. Strategi politik biasa digunakan dalam usaha merebut atau mempertahankan kekuasaan, terutama saat pemilihan umum. Strategi ini berkaitan dengan strategi kampanye, dengan tujuan untuk memperoleh kekuasaan dan pengaruh sebanyak mungkin dengan cara meraih hasil (suara) yang maksimal dipemilu, guna mendorong kebijakan-kebijakan yang dapat mengarah pada perubahan masyarakat (Schroder. 2009:7). Hennida (2009: 2) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa hal yang perlu dicermati sebagai acuan dasar dalam merencanakan strategi politik agar berjalan dengan baik. Pertama, bahwa berbagai hal yang dikatakan orang tentang dirinya (caleg perempuan) itu adalah tidak penting dan tidak perludi sikapi secara mendalam. Biarkan orang mengatakan apapun tentang dirinya, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apa yang telah atau akan dilakukan, bukan apa yang mereka katakan.

Kedua, pemilikan atas pemikiran yang strategis. Pemikiran tersebut bersifat tidak habis, terus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan mampu membuat berbagai perencanaan yang bersifat dinamis. Menjadi ahli strategi bukan ahli taktik yaitu dengan melihat apa yang ada diatas perang itu sendiri, dan lebih melihat padatujuan jangka panjangnya, bukan tentang apa yangakan dinikmati hari ini. Pada dasarnya tidak ada sesuatu yang baku dalam menyusun (membangun) dan menerapkan strategi. Strategi dapat diterapkan dalam membangun perekonomian, menyelesaikan konflik sosial, persaingan dalam bisnis, akulturasi budaya, hingga membangun pertahanan negara. Berbagai strategi itu pun dapat diterapkan dalam bidang politik, termasuk untuk memenangkan calon pasangan bupati dan wakil bupati jalur independen melawan 12 partai politik tahun 2013.

2.2 TEORI CALON INDEPENDEN PEMILU

1. Calon Independen

Calon independen pemilu ialah tokoh masyarakat yang menjadi peserta pemilu secara perorangan tanpa menggunakan mekanisme kepartaian, akan tetapi memanfaatkan mekanisme kemasyarakatan dan atau kemampuan dan kekuatan pribadi. Calon pemilu independen seakan diperlakukan sebagai lembaga istimewa

yang dijadikan sumber kontroversi bermotif kepentingan dan prosedural sampai ideologis. Kehadirannya dianggap melemahkan dan bahkan membahayakan eksistensi partai politik. Persyaratannya menjadi peserta pemilu, bisa jadi menimbulkan masalah ketidakadilan dalam demokrasi. Calon persorangan diartikan sebagai wujud individualisme yang merupakan perwujudan dari ideologi liberalisme. Undang-undang no 8 tahun 2015 pasal 1 menyebutan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota secara langsung dan demokratis. Calon bupati dan calon wakil bupati, calon walikota dan calon wakil walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di komisi pemilihan umum kabupaten/kota. Berdasarkan undang-undang tersebut dapat memberikan arti bahwa dapat terbukanya peluang bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk maju melalui jalur perseorangan atau biasa disebut dengan calon independen. Pasangan melalui jalur perseorangan atau jalur independen dapat mendaftarkan diri maju dalam pemilihan kepala daerah baik sebagai gubernur dan wakil gubernur, walikota dan wakil walikota maupun sebagai bupati dan wakil bupati. calon perseorangan atau independen di tingkat kota sebagai walikota dan wakil walikota maupun surat putusan MK No 5/PUU-V/2007di tingkat kabupaten sebagai bupati dan wakil bupati haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
2. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);
3. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);

4. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen). Demokrasi telah membuka peluang bagi calon yang akan berpartisipasi di pemilukada untuk berpartisipasi melalui jalur independen dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:
    1) Calon perseorangan harus memiliki kompetisi untuk memberikan kontribusi positif dalam rangka memperbaiki sistem politik (dan juga sistem kepartaian).
    2) Calon perseorangan harus dapat mengafirmasikan fungsi-fungsi politik seperti fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan dan juga harus terlembaga dengan baik sehingga memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem politik yang ada.
    3) Calon perseorangan harus jelas akuntabilitasnya dalam sistem demokrasi dan tidak cenderung mengabaikan kepentingan masyarakat hanya sekedar untuk mengejar ambisi kekuasaan, kepentingan pribadi dan golongan.[10]

A. TINJAUAN TENTANG KOALISI PARTAI POLITIK

Teori koalisi partai telah lama berkembang di negara-negara yang menggunakan sistem parlementer. Menurut Arend (1995:221) Koalisi partai politik dapat dimaknai dengan upaya penggabungan kelompok individu yang saling berinteraksi dan sengaja dibentuk secara independen dari struktur organisasi formal, terdiri dari keanggotaan yang dipersepsikan saling menguntungkan, berorientasi kepada isu atau masalah, memfokuskan pada tujuan diluar koalisi, serta memerlukan aksi bersama para anggota. Dalam ranah politik, koalisi merupakan gabungan dua partai atau lebih yang memiliki tujuan untuk membentuk secara bersama satu pemerintahan. Pada negara yang 24 menggunakan sistem pemerintahan presidensil yang multi partai, Bambang Cipto (2000:22) mendeskripsikan definisi koalisi yakni suatu keniscayaan untuk membentuk pemerintahan yang kuat. Hakikat sebuah koalisi

[10]http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/21589/SKRPISI%20WINNY%20ANGGREINY%20R..pdf?sequence=1

ialah untuk membentuk pemerintahan yang kuat (strong), mandiri (autonomus), dan tahan lama (durable). Pemerintahan yang kuat bisa diartikan sebagai pemerintahan yang mampu menciptakan dan mengimplementasikan kebijakannya tanpa khawatir mendapat penolakan atau perlawanan di parlemen. Sampai saat ini koalisi yang tercipta antara partai politik tidak ada yang ideal, tidak ada satupun koalisi yang digalang para elit menghasilkan paduan yang sesuai dengan hakikatnya. Bentuk koalisi yang sering ditemui ialah koalisi yang membingungkan, secara kompleks kekuatan politik, aktor dan ideologi menjadi faktor yang menyulitkan. Secara teoritis koalisi partai hanya akan berjalan bila dibangun diatas landasan pemikiran yang realistis dan layak.

1. Jenis-Jenis Koalisi Efriza (2012) dalam bukunya yang berjudul Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik danmengacu pada teori Arend Lijphart mengemukakan dengan jelas beberapa bentuk koalisi berdasarkan jenisnya, antara lain :
    a) Koalisi Berbasis Ideologi

        Teori koalisi berbasis ideologi berfokus pada pentingnya kesamaan ideologi dan kebijakan partai sebagai pertimbangan dalam membentuk koalisi. Ambardi dalam de Swan (1973) menjelaskan bahwa teori ini menyatakan bahwa para politikus umumnya ingin meninggalkan jejak ideologi dankebijakan partai di pemerintahan. Politikus ini tidak menjadikan jabatan kabinet sebagai tujuan akhir, melainkan sekedar sarana untuk menerapkan kebijakan tertentu. Karena memilih dan mempertahankan kebijakan terbaik menjadi dorongan utama, maka pertalian ideologis menjadi dasar pembentukan koalisi. Oleh Karena itu, besar kecilnya koalisi tidak menjadi kriteria utama dalam merangkul atau mengesampingkan satu partai. Hal yang paling penting ialah koalisi tersebut berusaha membentuk pemerintahan yang kompak (ambardi dalam Gallagher, Laver, Mair 1995:305). Dalam konteks ini, partai politik berfungsi sebagai sabuk transisi.

b) Koalisi Kemenangan Minimal (*mininal-winning coalition*)

Teori ini menyatakan prinsip dasar koalisi berada pada maksimalisasi kekuasaan dan meraih jabatan pemerintahan sebanyak mungkin. Teori kemenangan minimal ini beranggapan bahwa duduk di pemerintahan merupakan tujuan pokok partai karena akan memberi peserta koalisi keuntungan dari segi politik dan material.Hal ini dilakukan dengan cara mencari sebanyak mungkin partai politik yang memperoleh kursi di kabinet untuk bergabung dan mengabaikan partai-partai yang tidak perlu untuk diajak berkoalisi. Dalam teori ini partai-partai bergabung membentuk koalisi dengan menghitung kemungkinan pemenangan suara terbanyak, yakni 50% + 1. Biasanya peserta koalisi akan berhenti menjadi rekan baru ketika perolehan kursi parlemen 50 persen telah terlampaui. Kondisi ini dikemukakan oleh Ambardi dalam Riker (1962:33) yang menjelaskan bahwa peserta koalisi akan membentuk koalisi seminimal mungkin asal menjamin kemenangan dalam persaingan, dan tidak akan menambah peserta lagi. Dengan demikian keuntungan politik yang didapat dapat di distribusikan secara maksimal kepada peserta koalisi. Secara singkat peserta koalisi hanya berfokus pada suara yang dibutuhkan guna memenangkan pertarungan politik.

c) *Minimal Range Coalition*

Dasar dari pelaksanaan koalisi ini adalah kedekatan pada kecenderungan ideologis untuk memudahkan partai-partai dalam berkoalisi dan membentuk kabinet dalam sebuah pemerintahan.

d) *Minimum Size Coalition*

Koalisi ini merupakan Partai dengan suara terbanyak akan mencari partai yang lebih kecil untuk bergabung demi sekadar mencapai suara mayoritas.

e) *Bargaining Proposition*

Merupakan koalisi dengan jumlah anggota partai paling sedikit untuk memudahkan proses negosiasi dalam pemerintahan dan dalam pembentukan kebijakan.

Dasar dari teori ini dilaksanakan adalah untuk memudahkan proses tawar-menawar dan negosiasi karena anggota atau rekanan koalisi hanya sedikit.[11]

Sebagai acuan dalam penelitian ini dan juga untuk mempermudah proses penyusunan makalah ini, peneliti menggunakan teori modal social untuk mendukung penelitian ini.

2.3 Teori Modal Sosial

Selama satu dekade terakhir, modal sosial menjadi perhatian serius dalam sosiologi, ekonomi, ilmu politik, kesehatan dan bahkan dikembangkan oleh kerja-kerja agen pembangunan internasional. Perhatian serius pada modal sosial tampaknya paralel dengan perhatian pada *good governance*, desentralisasi, demokrasi lokal, pemberdayaan, *civil society* dan seterusnya. Secara akademik, apa sebenarnya yang dimaksud dengan "modal sosial"? Istilah "modal sosial" sebenarnya sudah lama dikenalkan oleh sosiolog kenamaan Emile Durkheim pada abad ke-19. Durkheim menyebut istilah "modal sosial" untuk menyatakan ikatan sosial antarmanusia di dalam sebuah masyarakat sangat penting untuk membentuk kohesivitas sosial dalam mencapai tujuan bermasyarakat.Ia merupakan sebuah kekuatan untuk mencapai tujuan hidup bersama yang tidak mungkin dicapai secara personal. Sebagai contoh, misalnya, kegiatan pendidikan. Pendidikan merupakan aktivitas kolektif antara pendidik, siswa, masyarakat, dan pemerintah. Sebagai sebuah aktivitas kolektif, pendidikan memerlukan kerjasama banyak pihak, mulai dari pemimpin sekolah, para guru, tenaga administrasi, murid, orangtua siswa, komite sekolah, dan tentu pemerintah. Jika semuanya fungsional sesuai tugas dan peran masing-masing, maka pendidikan akan berjalan baik dengan hasil yang baik pula

[11]http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/8518/BAB%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Dalam hubungannya dengan konteks politik, kami melihat bahwa modal sosial merupakan salah satu penggerak masyarakat, mengapa mereka mau bersatu dan apa yang menjadi pengikat mereka. Dengan menelaah modal sosial, kami berusaha melihat apakah modal sosial ini berhasil dieksploitasi oleh calon independen untuk bisa memenangkan pilkada.

Dalam artikel ini, kami akan mengangkat konsep model sosial yang diutarakan oleh Robet Putnam dalam tulisannya, *Making Democracy Work*, dikemukakan bahwa terdapat tiga unsur penting yang dapat menjamin keterikatan sosial masyarakat; yaitu keberadaan norma, nilai sosial dan kepercayaan (*trust*) serta jaringan sosial (*social networks*).

METODE PENELITIAN

Bab ini membahas beberapa hal yang berhubungan dengan metode penelitian, antara lain: Lokasi penelitian, pendekatan penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative research*), yang menghasilkan data deskriptif, yaitu berupa kata, ucapan, tulisan, dokumen, dan tindakan yang dilakukan informan penelitian. Jadi bukan data yang berupa angka-angka atau data statistik matematis. Kesimpulan-kesimpulan penelitian dibuat tidak berdasar perhitungan kuantitatif, tapi berdasar deskripsi cermat atas realitas. Penelitian diskriptif-kualitatif berupaya untuk mendiskripsikan secara menyeluruh mengenai pola-pola strategi kemenangan pasangan jalur independen H. Sudarsono, S.H-Yulhaidir melawan pasangan H. Ahmad Ruswandi – H. Sutrisno yang diusung koalisi besar 12 partai politik, dilihat dari perspektif sosial, politik, dan perkembangan ekonomi Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah.

3.2 Lokasi Penelitian

Pemilihan penetapan lokasi dilakukan dengan cara purposive yang didasarkan pada suatu pertimbangan bahwa di lokasi ini berdasarkan pada studi pendahuluan,

fakta, dan pemberitaan media, dan menarik untuk diteliti. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah.

3.3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan informan dan analisis dokumen pendukung. Data dari informan berupa pertanyaan-pertanyaan menjadi sumber data utama (primer). Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen pendukung dari tim sukses dari pasangan independen Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan tahun 2013.

3.3.1 Informan

Subyek penelitian dalam penelitian kualitatif ditentukan secara sengaja (*purposive sampling*), subyek penelitian ini menjadi informan yang memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian.

Informan adalah mereka yang memiliki informasi, pengalaman, wewenang, aktor yang terkait langsung dengan pemilukada bupati dan wakil bupati Kabupaten Seruyan jalur independen tahun 2013. Yaitu:

1. Bupati Sudarsono Kabupaten Seruyan 2013
2. Juru bicara Bupati Sudarsono Kabupaten Seruyan
3. Tim pendukung
4. Tim sukses

TEMUAN DAN ANALISIS DATA

Untuk mewujudkan dan melaksanakan perannya sebagai seorang pemimpin, sudah pasti Kepala Daerah disyaratkan memiliki sikap dasar dan sifat-sifat kepemimpinan, teknik kepemimpinan dan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan kondisi lingkungan organisasi, pengikut serta situasi dan kondisi yang melingkupi organisasi yang dipimpinnya itu, serta ditopang pula oleh kekuasaan yang tepat.

Dalam konteks sebagai pemimpin, kepala daerah disyaratkan pula untuk memiliki sifat-sifat tertentu. Misalnya mengemukakan sifat-sifat tertentu, seperti:

berkepribadian, kemampuan, dan kesanggupan untuk merealisasikan ide-idenya menjadi serangkaian kegiatan. Setiap pemimpin, perlu pula menyadari bahwa kepemimpinannya merupakan proses antar hubungan atau intraksi antar pemimpin, bawahan dan situasi.[12]

Ketika sistem pemilihan kepala daerah langsung dinegeri ini ditabuh dan diberlakukan sejak 1 juni 2005, memang telah menumbuhkan antusiasme banyak tokoh diseleuruh penjuru nusantara untuk tampil sebagai kontestan dalam arena pemilukada langsung dan pemilu legislatif. Sebagian orang ada yang dilatari oleh ambisi untuk mereguk sederet kejayaan diri bila mana berhasil memenangkan pemilihan langsung pejabat public. Lantas, mereka memulai membayangkan pula untuk bias meraih kebanggaan, kekuasaan, wibawah jabatan, materi, spirit hidup, citradiri, penghormatan, dan berbagai kemudahan dalam hidup layaknya penguasa. Kebutuhan aktualisasi diri ini sah-sah saja, namun demikian dorongan untuk mengikuti pemilihan langsung ini seyogyanya memperhitungkan juga resiko sebelum maju bertarung pada kontestasi ini.

Paling tidak, ada enam resiko yang mesti diperhitungkan setiap orang yang hendak maju dalam pemilihan kepala daerah langsung, seperti: resiko biaya, resiko waktu, resiko tenaga, resiko penampilan, resiko social, serta resiko pysologis. Selain itu setiap kandidat layak pula untuk melakukan instropeksi diri guna mengukur dengan cermat bahwa selain dorongan manusiawi untuk mencapai kejayaan, juga disertai landasan emosional untuk memikul tanggung jawab dalam menciptakan perubahan lebih baik. Bagaimanapun, meski adanya hak dan peluang yang sama untuk melakukan kontestasi tetapi setip orang juga mesti meyadari bahwa demokrasi memiliki nilai-nilai luhur yang mengedepankan meritokrasi. Artinya, kompetensi prestasi, reputasi dan rekam jejak seorang kandidat juga mesti menjadi prasyarat terpenting dalam domain kepemimpinan politik.[13]

---

[12] Sarbinnor Karim, et., al., 2004, ”Independen Sang Pendobrak”, Jakarta: Indomedia Global Mandiri, Hlm 115

[13] *Ibid*, Hlm 118

Kendatipun lahir di sebuah desa nan terpencil di hulu Sungai Seruyan, tepatnya di Tumbang Manjul, Ibukota Kecamatan Seruyan Hulu. Tapi sosok Sudarsono sendiri lebih merasakan Pembuang Hulu, Ibukota Kecamatan Hanau (masih dalam wilayah Kabupaten Seruyan), sebagai kampong halaman kedua. Sebagai lulusan PGAN, di kampung halamannya beliau diserahi amanah sebagai Kepala SMP Wiraswasta, sebuah SMP swasta yang dikelola Yayasan Pendidikan yang baru saja berdiri di kampungnya. Namun, amanah sebagai Kepala SMP Wiraswasta ini sekedar noktah persinggahan sementara dalam rangka menuju asanya untuk menjadi orang yang kelak dapat berbuat sesuatu yang lebih besar, walau Sudarsono sendiri tidak tahu hendak menjadi apa. Roda waktu terus berputar, kehidupan terus berlangsung. Tahun 1995, Sudarsono mengikuti tes resmi dan diterima bekerja di PT Tanjung Lingga (1995-1998), yang berbasis usaha pada Hak Pengusahaan Hutan (HPH) kayu log. Kemudian pada tahun 1998 itu pula Sudarsono lantas memutuskan bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN) besutan tokoh Prof. Dr. Amien Rais, M.A. pada Rakernas PAN yang pertama di Bandung, Provinsi Jawa Barat dengan menyandang predikat Bendara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Kabupaten Kotawaringin Barat. Namun, Sudarsono tidak ingin berlama-lama berlabuh di PAN. Pada awal 1999, dia berpindah haluan partai politik, menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Cabang Partai Uni Demokrasi Indonesia (DPC PUDI), masih di Kotawaringin Barat.

PUDI adalah sebuah partai politik yang dibidani oleh tokoh gerakan reformasi Dr. Ir. Sri Bintang Pamungkas. PUDI yang lahir pada 29 mei 1996 di Jakarta itu merupakan salah satu partai politik di Indonesia yang pernah menjadi peserta Pemilihan Umum (Pemilu) di era reformasi tahun 1999. Pada tahun ajaran 2000/2001, Sudarsono langsung membuka SMA Miftahussalam di Pembuang Hulu. Pada tahun 2004, Sudarsono lantas membuka lagi SMK Miftahussalam Pembuang Hulu. Melihat kompetensinya yang menonjol di bidang pendidikan, selain menjadi guru ia juga dipercaya sebagai Kepala SMA Miftahussalam Pembuang Hulu (2000-2004). Berikutnya, ia juga memberikan kontribusi yang besar bagi pendirian SMK

Mifathussalam Pembuang Hulu, sehingga lagi-lagi ia kembali dipercaya sebagai Kepala SMK tersebut (2004-2009).[14]

Setelah relatif lama vakum di dunia politik praktis, menjelang tahun 2009, Sudarsono kembali ingin terjun di jagad politik praktis. Kali ini pilihannya jatuh ke partai berbasis kader, Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Terpilihnya Sudarsono pada Pemilu 2009 dapat dikatakan sebagai hasil pemilu yang cukup fenomenal. Karena pada Pemilu 2009 itu, PKS justru tidak mendapatkan kursi sama sekali di lembaga legislatif pada tingkat kabupaten, khususnya di Kabupaten Seruyan maupun Kabupaten Kotawaringin Timur yang menjadi daerah pemilihannya untuk melaju sebagai anggota DPRD Provinsi. Pada 2012, provinsi Kalteng, DI Yogyakarta, dan Tana Toraja, terpilih mewakili Indonesia untuk diikutsertakan dalam ajang pameran flora dan fauna tingkat dunia yang diselenggarakan di Belanda.[15]

Sudarsono, menggunakan teori ilmiah, juga kalkulasi dari kondisi serta realitas dilapangan dijadikannya pengangan riil ketika ia memutuskan untuk mengikuti ajang kompetisi pemilukada langsung dan mencalonkan diri sebagai kandidat Bupati Seruyan 2013-2018. Kemenangannya meraih kursi DPRD Kalteng pada pemilu legislatif 2009, menjadi salah satu testcase bagi Sudarsono untuk merebut jabatan calon pemimpin kepala daerah di kabupaten Seruyan. Setelah terpilih menjadi anggota DPRD Kalteng 2009-2014, sejak awal Sudarsono memang terpikir untuk maju pilkada Seruyan 2013. Kenapa Sudarsono memilih anggota DPRD provinsi Kalteng? itu latar belakangnya, karena Sudarsono ingin tahu, apakah dirinya dipercaya oleh rakyat Seruyan untuk menjadi wakil mereka. Karena kalau Sudarsono duduk di provinsi Kalteng otomatis Sudarsono mewakili salah satu Kabupaten, bukan lagi kecamatan-kecamatan. Itulah tescase pertama Sudarsono sebenarnya.[16]

Tescase Sudarsono terbukti jitu, dan ia akhirnya terpilih sebagai anggota DPRD Kalteng untuk periode 2009-2014. Langkah berikutnya adalah untuk menyiapkan dirinya dengan sebik mungkin untuk menikuti kompetensi pilkada

---

[14] *Ibid*, Hlm 91
[15] *Ibid*, Hlm 99
[16] *Ibid*, Hlm 121

Seruyan 2013. Petanyaannya, kenapa memilih jalur independen? Sudarsono menegaskan, ia memilih jalur independent karena sejak awal dirinya menggembangkan konsep kepemimpinan mendengarkan suara rakyat. Selain itu, ia berfikir tidak mungkin melalui jalur partai politik, sebab dirinya tidak memiliki uang yang cukup, tambahan lagi parpol yang ada lebih cenderung mendukung incumbent Bupati Seruyan H. Darwan Ali yang sedianya mengusung anaknya H. Ahmad Ruswandi.[17]

Sudarsono memilih jalur independent karena sejak awal ia mengembangkan pola kepemimpinan mendengar suara rakyat, karena berasal juga dari kelompok masyarakat maka konsekuensinya saya harus mendengar kelompok-kelompok yang ada di masyarakat tersebut. Di dalam kelompok- kelompok masyarakat itu harus saya dengar dan akamodir kepetingannya. Selain itu, rasanya tidak mungkin melalui jalur partai politik sebab tidak memiliki uang yang cukup, demikian Sudarsono menjelaskan pilihan sikapnya dalam memilih jalur independent (perseorangan).[18]

Seperti diketahui, mekanisme yang sesuai dengan undang-undang nomer 32 Tahun 2004 awalnya calon atau kandidat kepala daerah hanya bisa diusulkan oleh partai politik atau gabungan parpol, jadi tidak diperkenankan munculnya calon independent yang non/partisipan. Namun politik selalu berjalan dinamis. Pada perkembangan berikutnya lahirlah keputusan yang akhirnya memperbolehkan calon perseorangan/independent sesuai amar putusan mahkamah konstitusi (MK) untuk ikut dalam kompetisi pemilukada langsung. Berdasarka keputusan MK tersebut berdasarkan judicial review terhadap pasal 59 UU no 32 tahun 2004, diusulkan oleh salah satu anggota partai politik dari Nusa Tenggara Barat yang sebelumnya tidak berhasil meyakinkan partai politik untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah.

Meski begitu, menurut Prof. Dr. Ramlan Surbakti bagi calon perseorangan atau calon independent dapat lolos sebagai calon kepala daerah, jelas akan memerlukan dana yang tidak sedikit. Untuk membiayai persyaratan dukungan dari

---

[17] *Ibid*, Hlm 122
[18] *Ibid*, Hlm 122

penduduk yang berhak memilih sja misalnya, seperti biaya memfotocopy KTP penduduk atau identitas lainnya yang sah, dan jumlahnya puluhan ribu, ratusan ribu, hingga jutaan pemilih. Bila lolos sebagai calon, langkah berikutnya juga masih memerlukan dana yang sangat besar baik untuk pengorganisasian tim sukses, tim kampanye, maupun pengadaan bahan pelaksanaan kampanye disemua daerah pemilihan.[19]

Kepala daerah yang sukses membuat lompatan perubahan di daerahnya itu adalah merupakan output Pemilukada langsung yang memang dikehendaki rakyat. Terkdang, mereka terpilih dari koalisi beberapa partai politik (parpol) besar karena melihat potensi dan kasus besar calon kepala daerah tersebut. Di sisi lain, ada pula koalisi sejumlah parpol kecil guna memenuhi persyaratan pendaftaran buat mengusung pasangan calon kepala daerah. Namun, ada pula yang terpilih dari jalur independen dan mampu merontokkan dominasi koalisi 12 parpol besar sebagaimana dialami pasangan Sudarsono-Yulhaidir lewat ajang kompetisi Pemilukada langsung Bupati/Wakil Bupati Seruyan 2013 lalu. Hal ini membuktikan, bahwa dominasi parpol tidak otomatis mampu mendudukkan seorang calon Kepala Daerah memenangi kompetisi pemilukada langsung. Disinilah, kekuatan figure (calon) Kepala daerah yang dimunculkan berperan penting dalam mendulang simpati dan suara rakyat yang pada akhirnya mendudukkan calon tersebut sebagai pemimpin terpilih.[20]

Selain itu, demokrasi juga mensyaratkan keterlibatan masyarakat secara mandiri dalam setiap proses pengambilan keputusan atas kebijakan pembangunan. Syarat tersebut hanya dapat dipenuhi dengan memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menentukan dan merumuskan sendiri kebutuhannya. Terlepas dari kenyataan bahwa demokrasi bisa dipandang secara berbeda, sebenarnya ada unsur-unsur dasar atau family resemblance yang mebuat sebuah system dapat disebut demokratis. Ada baiknya sebelum melihat realitas pemilukada langsung, pemikiran

---

[19]Sarbinnor Karim, et., al., 2004, *"Independen Sang Pendobrak*", Jakarta: Indomedia Global Mandiri, Hlm 125

[20] *Ibid*, Hlm 128

Robert A. Dahl dalam bukunya *Polyarchy: Participation and Opossition*, dapat dijadikan pijakan awal dalam membaca peta demokrasi. Dahl melihat Sebuah rezim politik dapat dianggap sebagai demokratis jika :

1. Menyelenggarakan pemilihan yang terbuka dan bebas
2. Mengembangkan pola kehidupan politik yang kempetitif
3. Memberi perlindungan terhadap kebebasan mayarakat atau *civil liberties* (Zein, 2004; Yana; 2006).[21]

Roda waktu bergulir begitu cepat. Setelah melalui tahapan verifikasi akhirnya hanya muncul dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Seruyan yang lolos verifikasi KPU Seruyan, berdasarkan nomor urut calon, yaitu:

1. Sudarsono–Yulhaidir (Surya) merupakan calon independen (perseorangan)
2. H. Ahmad Roswandi–H. Sutrisno (Harus) merupakan calon yang diusung gabungan 12 Partai politik

Sementara itu, calon Bupati Ahmad Selanor Wanda dan calon wakil Bupati Hj. Masfuatun yang sebelumnya sempat gencar melakukan sosialisasi tidak biosa mendaftarkan calonnya ke KPU lantaran partai pendukungnya (partai Golkar dan PPP) belakangan ada pertarungan elit politik di Kalteng. Akhirnya kedua parpol tersebut memilih mendukung pasangan H.Ahmad Roswandi–H.Sutrisno.

Mengerucutnya pasangan Bupati dan wakil Bupati Seruyan pada dua nama calon, justru seolah menjadi bumerang bagi incumbent H. Darmawan Ali yang menusung anaknya H. Ahmad Ruswandi. Perlahan dan pasti bak bola salju, dukungan terhadap pasangan Sudarsono kian membesar dan mengkristal. Dalam berbagi kesempatan pertemuan dan kampanye dialogis keduanya selalu dielu-elukan ribuan masa yang sudah lama menginginkan perubahan.[22]

Singkat cerita, setelah melewati masa kampanye yang melelahkan tibalah hari pencoblosan yang ditunggu oleh masyarakat. Kini, giliran masyarakat Seruyan yang

---

[21] *Ibid*, Hlm 131

[22] *Ibid*, Hlm 133

menentukan siapa pemimpin mereka yang pantas mengemban mandat rakyat untuk memimpin daerah Ibukota Kuala Pembuang ini untuk masa lima tahun kedepan. Karena itulah rakyat berbondong-bondong menuju bilik suara guna mempergunkan hak pilihnya, yakni untuk memilih Bupat-Wakil Bupati Seruyan sesuai pilihan hati nuraninya.

Tabel 1. Hasil perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawan 12 Partai Politik Kabupaten Seruyan 2013

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Persentase Perolehan Suara	Partai Pengusung
1.	H. Sudarsono, S.H. – Yulhaidir	42.226 suara (53,65 %)	Independen
2.	H. Ahmad Roswandi – H. Sutrisno	36.478 suara (46,35%)	1. PDIP 2. Partai Demokrat 3. Partai Golkar 4. PKB 5. PAN 6. Hanura 7. Gerindra 8. PPRN 9. PKPB 10. PBB 11. PPP 12. Partai Kedaulatan

Sumber: KPU Kabupaten Seruyan 2013

Berdasarkan table 1. di atas dapat dilihat bahwa hasil pleno rekapitulasi rapat yang dipimpin langsung oleh KPU Seruyan Sudarmono, SH akhirnya menetapkan pasangan calon independen (perseorangan Sudarsono - Yulhaidir) berhasil meraup 42.226 suara (53,65 persen) mengungguli pasangan yang diusung 12 parpol

diantaranya adalah parpol pengusung dari PDIP, Partai Demokrat, Partai Golkar, PKB, PAN, Hanura, Gerindra, PPRN, PKPB, PBB, PPP dan Partai Kedaulatan, H. Ahmad Roswandi – H. Sutrisno yang hanya meraih 36.478 suara (46,35 persen) dari 78.704 suara sah.

Tabel 2. Hasil Suara Rapat Pleno KecamatandiPilkada Kabupaten Seruyan 2013

No.	Kecamatan	SUR-YA	HA-RUS
1	Seruyan Tengah	7.353	4.897
2	Seruyan Hulu	2.810	2.216
3	Seruyan Raya	3.583	5.548
4	Danau Sembuluh	2.244	4.058
5	Danau Seluluk	4.849	3.509
6	Hanau	7.584	3.375
7	Batu ampar	2.264	2.404
8	Suling Tambun	896	552
9	Seruyan Hilir	8.779	7.835
10	Seruyan Hilir Timur	1.882	2.070
	Jumlah	42.226	36. 464
	Selisih Suara SUR-YA dan HA-RUS	5.762	-
	Presentasi	53,65%	46,35%

Berdasarkan table 2 di atas dapat dilihat bahwa hasil suara rapat pleno kecamatan di Kabupaten Seruyan menetapkan pasangan calon independen (perseorangan Sudarsono - Yulhaidir) berhasil mendapatkann 42.226 suara (53,65 persen) mengungguli pasangan yang diusung 12 parpol H. Ahmad Roswandi – H. Sutrisno yang hanya meraih 36.478 suara (46,35 persen) dari 78.704 suara sah dengan selisih 5.762 Suara. Pasangan Sudarsono – Yulhaidir menang pada enam kecamatan dari sepuluh kecamatan di seluruh kecamatan Kabupaten Seruyan, sedangkan pasangan H. Ahmad Roswandi – H. Sutrisno unggul pada empat

kecamatan. Enam kecamatan yang menjadi pundi suara Sudarsono disebut-sebut sebagian besar penduduknya adalah warga lokal sedangkan empat kecamatan yang dimenangkan pasangan Ahmad umumnya merupakan daerah perusahaan kelapa sawit yang banyak dihuni penduduk pendatang.

Kemenangan Sudarsono ini menjadi simbol pendobrak bagi keterpilihan calon independen atau perseorangan yang sangat fantastis dan fenomenal. Sebab selama ini, keikutsertaan calon independen terkesan dianggap sebelah mata dan hanya dianggap penggembira politik belaka. Sebab dari 380 ajang pilkada langsung diseluruh Indonesia yang juga diikuti calon independen, tak sampai 10 kandidat independen yang berhasil menang. Menurut catatan tim editor indo media, Sudarsono adalah Bupati pertama di Kalteng serta ketujuh di seluruh Indonesia yang terpilih dari jalur independen setelah enam bupati atau walikota terpilih lainnya dari jalut independen, yaitu:

1. Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain yang sukses memenangi dua kali pilkada langsung Bupati Batubara, provinsi Sumatra Utara pada 2008 – 2013.
2. Bupati kubu Karya Muda Mahendrawan yang sukses memenangi pilkada langsung Bupati kubu Raya provinsi Kalimantan Barat pada 2008
3. Bupati Garut H.M. Aceng Fikri yang sukses memenangi pilkada langsung di Garut Provinsi Jawa Barat pada 2009, tapi pada akhirnya dilengserkan oleh DPRD Garut karna kasus nikah sirinya
4. Bupati Drs. Leonard Haning MM yag sukses memenangi pilkada langsung Bupati Rote Ndao provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2009
5. Bupati Lampung Timur H. Satono yang sukses memenangi pilkada pada 2010

6. Bupati Tanjung Jebung Timur Zumi Zola Zulfikri yang berlatar belakang selebritis dan sukses memenagi pilkada provinsi Jambi pada 2011.[23]

4.1 Pola strategi dalam kemenangan dari independent melawan 12 partai poltik

Memikat hati rakyat dengan membuka potensi apa yang ada di daerah Kabupatren Seruyan untuk memajukan perekonomian masyarakat diantaranya:

1. Dari sektor perikanan

   Potensi Kabupaten Seruyan ini untuk lautan lebih luas dan menunjang untuk para nelayan.
2. Pertanian

   Untuk tanaman hultikultura dan cetak sawah.
3. Perkebunan

   Terutama di perkebunan kelapa sawit karena banyak PBS perkebunan sawit di Kabupaten Seruyan, terdapat 48 perusahaan kelapa sawit. Dengan adanya perjanjian plasma yang nantinya apabila terpilihnya Sudarsono menjadi Bupati Kabupatrn Seruyan, plasma tersebut akan diperjanjikan untuk hak masyarakat, 20% dari kebun PBS menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 26 tahun 2007 dan diperbaharui menjadi Peraturan Menteri Pertanian No. 98 tahun 2013, yang menekankan bahwa sejak bulan Februari 2007 apabila terjadi pembangunan perkebunan kelapa sawit, perusahaan inti wajib untuk membangun kebun masyarakat di sekitarnya, dimana areal lahan diperoleh dari 20% ijin lokasi perusahaan atau membangun kebun dari lahan masyarakat yang ada disekitarnya.
4. Pendidikan

   Akan dibangunnya jaringan masuk desa. di desa di Kabupaten Seruyan sangat terosilir dan minim dari pendidikan dan tidak adanya jalur darat yang menuju

[23]Sarbinnor Karim, et., al., 2004, "*Independen Sang Pendobrak*", Jakarta: Indomedia Global Mandiri, Hlm 141

sekolah dengan cepat bahkan harus menaiki perahu untuk menuju sekolah dasar di daerah tersebut.

5. Kesehatan

   Untuk dari segi kesehatan secara otomatis pemerintah Kabupaten Seruyan mengikuti pemerintah pusat, Jamkesmas, Jamkesda, dan lain-lain.

Disamping hal itu, masyarakat yang mengetahui masalah yang tengah terjadi di Kabupaten Seruyan dalam kurun waktu 10 tahun dampak kepemimpinan terdahulu, bahwa terjadi tidak adanya perkembangan untuk Kabupaten Seruyan ini, bahkan semakin buruk dari sector pendidikan maupun infrastruktur lebih memilih mendukung pasangan independen ini. Keberhasilan pemimpin sebelumnya bukan untuk Kabupaten Seruyan, namun hanya untuk keluarga, saudara-saudara dan kerabat dekat yang benar-benar menikmati hasil pemekaran di Kabupaten Seruyan. Dari bukti itulah akhirnya masyarakat menghendaki atas perubahan kepemimpinan atau bias dikatakan reformasi.

4.2 Strategi untuk Perlawanan ke 12 Partai

Pada saat itu lawan/rival politik dari Pak Sudarsono yaitu pasangan H. Ahmad Ruswandi-H. Sutrisno yang diusung koalisi besar 12 partai politik, namun itu hanya sekedar parpolnya namun mesin politiknya lebih memilih pasangan dengan jalur independen. Yang diibaratkan kapal,yang terbeli adalah kapalnya saja sedangkan mesin itu sendiri tak dapat dibeli. Masyarakat Kabupaten Seruyan sudah ada rasa kecewa dan rasa antipati terhadap kepemimpinan terdahulu sehingga mereka berfikir tak jadi masalah jika 12 partai dibeli yang terpenting anggota parlemen atau legislatifnya 70% justru mendukung pasangan independen ini karena sosok figure pemimpin yang akan diperjuangkan, terutama adalah dapil-dapil kecamatan-kecamatan terirsolir. Masyarakat melihat dnegan jelas sangat sulit berkembangnya Kabupaten Seruyan dari sector pembangunan infrastrukur maupun pendidikan atas kepemimpinan terdahulu.

Pada 10 tahun ini pembangunan terpacu hanya sekedar untuk wilayah ibu kota saja baik dan APBD maupun dana APBN. Dari faktor itulah akhirnya masyarakat

suda ada rasa muak dan antipati dengan gaya kepemimpinan pasangan sebelumnya, bahkan tidak sampai disitu saja, diibaratkan "Putra Mahkota" anak dari pemimpin sebelumnya yang akan menjadi rival Pak Sudarsono yang membeli 12 partai tersebut ingin menjadi bupati periode selanjutnya dikarenakan ayahanda dari H. Ahmad Ruswandi sudah habis masa periodenya untuk menjabat menjadi bupati Kabupaten Seruyan.

Sebenarnya strateginya adalah dari masyarakat itu sendiri. Masalah dana dan biaya-biaya yang dibutuhkan selama berjalannya pilkada untuk pasangan jalur independen berasal dari rakyat sendiri, bahkan ada investor dan masyarakat di daerah tersebut yang turut menyumbang untuk selama kegiatan Sudarsono untuk menjadi Bupati Kabupaten Seruyan. Dana sukarelawan masyarakat terdiri dari sumbangan solar atau bensin hanya sekedar untuk mengisi jenset guna menghidupkan printer, karena didaerah Hulu adalah daerah sangat terpencil tidak ada listrik, oleh sebab itu masyarakat berinisiatif membawa printer dan jenset untuk menggalang KTP masyarakat daerah Kabupaten Seruyan.

Di hari sebelum pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Seruyan biasanya akan terjadi serangan fajar atau *money politik.* Seperti yang telah dikatakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pertemuannya dengan pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMII) 14 Maret 2012, Politik uang *(money politik)* adalah salah satu dari tiga penyakit dalam perpolitikan di Tanah Air. Dua lainnya adalah politik kekerasan, dan politik yang tidak mencerdasan.[24] Bukan kali ini saja Presiden menyampaikan keprihatinan tentang politik uang. Agustus 2010 lalu, menyusul temuan survey *Political Reseach Institusi for Democracy (Pride)* dan Yayasan Paramadina, tentang maraknya politik uang dalam pemilihan kepala daerah, Presiden juga menyinggung soal *Money Politics* dalam pidato kenegaraannya.[25] Kian parahnya politik uang, juga dikonfirmasi Lingkaran Survey Indonesia (LSI) dalam surveinya pada oktober 2010 lalu. LSI menemukan masyarakat kian permisif

[24] Harun Husein,2014, "Pemilu Indonesia", Jakarta Selatan: Perludem, Hlm 77
[25] *Ibid*, Hlm 77

terhadap politik uang. Betapa tidak, responden yang menyatakan politik uang dapat dibenarkan, telah meningkat hamper dua kali lipat disbanding 5 tahun lalu. Pada survei 2005, hanya 11,9 persen responden yang menyatakan politik uang dapat dibenarkan. Pada survei 2010, angkanya telah terdongkrak menjadi 20,8 persen.[26]

Berpegang dari pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan LSI, akhirnyamasyarakat dari Hulu sampai Hilir bergejolak, mereka bersiap siaga bergotong royong siapapun dari daerah manapun yang datang membawa mobil akan dirajia dan diperiksa. Karena kemungkinan mereka yang datang dengan ciri-ciri tersebut diisukan membawa uang guna dibagi-bagikan ke masyarakat daerah Kabupaten Seruyan (ber-*money politics*), terutama di daerah perkebunan. Hanya dari situlah terlihat dan Nampak bahwa kemenangan Sudarsono pasti akan terjadi. Karena hampir 50% masyarakat dari dulu memang bergejolak ingin perubahan. Dulu di tahun 2013 pada saat pemilihan Cabup dan Cawabup Kabupaten Seruyan sangatlah mudah untuk dukungan politik dalam pengumpulan KTP, bahkan masyarakat penduduk setempat sanggup turun walaupun jarak yang mereka tempuh begitu jauh, jika menggunakan sepedah montoh kurang lebih sekitar 20 km hanya sekedar untuk mengantar KTP saja. Begitu kuatnya kepedulian masyarakat daerah. Ada juga masyarakat daerah-daerah trans mendatangi posko-posko untuk menyumbang konsumsi bahkan ada yang sekedar menyumbang singkong yang mereka panen dikebun sendiri untuk diberikan kepada tim relawan Sudarsono di posko-posko terdekat. Adapun setelah disetiap acara atau kegiatan syukuran oleh tim dari Sudarsono, masyarakat senantiasa tetap menyumbang diantara menyumbang ayam, kambing bahkan ada yang menyumbang satu ekor sapi. Memang begitu luar biasa antusias masyarakat untuk mendukung pasangan independen ini.

Pasangan Sudarsono – Yulhaidir berhasil mengambil hati rakyat Kabupaten Seruyan yang sosoknya yang khas dan tegas dalam hal kepemimpinan. Rakyatpun dengan sendirinya menghendaki akan adanya perubahan, apalagi masyarakat telah

[26]*Ibid*, Hlm 78

mengerti soal perjanjian system plasma. Lebih tepatnya strategi Sudarsono pada saat itu membuka wawasan luas untuk masyarakat bahwasannya Kabupaten Seruyan mempunyai potensi yang sangat besar didalamnya tinggal bagaimana yang memimpin yang mengelola kabupaten tersebut.

Dipundaknya segudang masalah Seruyan kini dipertaruhkan untuk segera dientaskan: ketertinggalan, keterbelakangan dan kebodohan, yang merupakan masalah klasik pembangunan dunia ketiga.

KESIMPULAN

H. Sudarsono, S.H. namanya tiba-tiba melejit dan ramai menjadi perbincangan publik di seantero tanah air pasca kemenangannya yang fenomenal dan spektakuler pada Pemilukada Seruyan 2013. Pasangan Sudarsono-Yulhaidir (Surya) yang maju lewat Jalur Independen (Perseorangan) ini mampu menjungkirbalikkan Pasangan H. Ahmad Ruswandi-H.Sutrisno (Harus) yang diusung koalisi besar 12 partai politik (Parpol). Dengan kekuatan personalitas dan dukungan riil massa akar rumput (grass root), pasangan Surya meraih kemenangan telak 56,65 persen, sementara pasangan Harus 43,35 persen. Kemenangan fenomenal pasangan Independen versus koalisi besar 12 partai politik akhirnya dicatat di Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).Pasangan Sudarsono-Yulhaidir (Surya) yang maju lewat Jalur Independen (Perseorangan) ini menggunakan pola strategi diantaranya adalah pola strategi dari segi perikanan, pertanian dan berkebunan, pendidikan, dan kesehatan. Disamping itu masyarakat Kabupaten Seruyan sendirilah yang menginginkan adanya perubahan atas dasar kekecewaan mereka terhadap kepemimpinan terdahulu selama 2 periode (10 tahun). Kemenangan pasangan Surya ini spontan disambut sukacita masyarakat Seruyan yang sejak lama merindukan perubahan. Perubahan atas antithesis hegemoni politik yang selama satu decade terakhir berurat-akar mencengkeram bumi Seruyan. Kemenangan Sudarsono ini juga menumbuhkan antusiasme dan harapan baru bagi lahirnya demokratisasi di Kabupaten Seruyan.

DAFTAR PUSTAKA

Sarbinnor Karim, et., al., 2004, ”Independen Sang Pendobrak”, Jakarta: Indomedia Global Mandiri

Muhammad Asfar, 2006, *“Mendesain Managemen Pilkada”,* Surabaya: Pustaka Eureka

Wawan E. Kuswandoro, 2008, “*Anti Klimaks Politisasi Demokrasi Lokal*”, Surabaya: Nuansa Print

Syamsuddin Haris, 2014, “Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai”, Jakarta: PTGramedia Pustaka

Harun Husein, 2014*,”Pemilu Indonesi”*, Jakarta Selatan: Perludem

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=164790&val=4924&title=PERANAN%20MODAL%20SOSIAL%20DALAM%20KEMENANGAN%20SATONO%20DARI%20JALUR%20INDEPENDEN%20PADA%20PEMILIHAN%20UMUM%20KEPALA%20DAERAH%20DI%20KABUPATEN%20LAMPUNG%20TIMUR%20TAHUN%202010 (Diakses 1 Agustus 2017)

https://id.linkedin.com/pulse/kajian-teoritis-permentan-98-tahun-2013-kemitraan-plasma-eko-zulkifli (Diakses 29 Juli 2017)

http://info-kalimantantengah.blogspot.co.id/2011/06/profil-kabupaten-seruyan.html (Diakses 29 Juli 2017)

http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/21589/SKRPISI%20WINNY%20ANGGREINY%20R..pdf?sequence=1 (Diakses 1 Agustus 2017)

http://digilib.unila.ac.id/13040/16/TINJAUAN%20PUSTAKA.pdf (Diakses 1 Agustus 2017)

http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/8518/BAB%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y (Diakses 1 Agustus 2017)